BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah merupakan salah satu bagian dari demokratisasi guna menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintahan. Selain itu otonomi daerah juga menuntut kemandirian sistem manajemen yang ada di daerah. Pemberian otonomi daerah pada kabupaten dan kota bertujuan agar pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik difokuskan untuk mengelola sistem dana secara desentralisasi dengan transparan, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas (Triwardana, 2017).

Pemerintah telah mengatur sistem akuntansi pemerintahan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Pusat. Oleh karena itu sistem akuntansi pemerintah pada tingkat permerintah daerah diatur dalam Permendagri No.59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu syarat dan pedoman bagi pemerintah untuk dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas.Pemerintah daerah selalu berupaya untuk mengintensifkan langah-langkah pengelolaan keuangan daerah dengan baik guna mencapai *Good Government Governance*. Langkah yang dilakukan pemerintah diberbagai Peraturan dan Undang-Undang adalah dengan terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam mengelola keuangan daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan yang dikelolanya adalah dalam bentuk penyampaian laporan keuangan. SAKD adalah sistem informasi yang membantu proses pencatatan dan pelaporan anggaran dan keuangan daerah (Santosa, 2016).

1.2. Ruang Lingkup Penelitian

Akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas dan informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan (Andini, 2015).

Sistem akuntansi pada organisasi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selaku entitas akuntansi akan melaksanakan system akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah dancprosedur akuntansi selain kas. Pengembangan sistem akuntansi memerlukancsuatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap system yang dikembangkan.

Keberhasilan suatu implementasi sistem tidak hanya dilihat dari teknis pengembangan dan penguasaan teknis saja, namun beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi. Suatu studi yang menyelidiki bagaimana individu-individu, kelompok-kelompok, serta struktur mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku dalam organisasi disebut dengan perilaku organisasi. Perilaku mengacu pada apa yang ingin dilakukan oleh orang dalam organisasi, bagaimana orang-orang tersebut dibentuk, dan apa sikap mereka (Lubis, 2010).

Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian,tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri. Menurut (Mahmudi, 2010: 9) dalam (Afianti,2013).

Pada prinsipnya sistem akuntansi pemerintah daerah bisa berupa sistem akuntansi maupun berkomputerisasi. Jika pemerintah daerah sudah menggunakan sistem akuntansi berkomputerisasi, maka beberapa tahap dalam siklus akuntansi bisa digantikan oleh komputer. Dengan demikian, apabila pemerintah tersebut menggunakansistem akuntansi berkomputerisasi maka akan sangat menghemat waktu dan tenaga, informasi laporan keuangan yang dihasilkannya pun akan lebih tepat waktu, lebih bervarasi, dan akan lebih berkualitas (Atmaja, 2016). Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangat penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan. mengungkapkan bahwa jika belum memahami sistem akuntansi, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan. Sistem akuntansi memberikan pengetahuan tentang pengolahan informasi akuntansi sejak data direkam dalam dokumen sampai dengan laporan yang dihasilkan (Arfan,2015).

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disusun atau dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi pemerintah daerah yang handal, yang bisa dikerjakan secara manual ataupun menggunakan aplikasi komputer. Namun mengingat sumber daya manusia yang masih sangat minim yang berspesialisasi di bidang akuntansi khususnya akuntansi keuangan sektor publik maka akan lebih tepat jika menggunakan sistem aplikasi komputer yang komprehensif dan sudah teruji (Abdullah, 2014).

Hal ini akan dapat meminimalkan kesalahan proses akuntansi dan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan laporan keuangan yangdiperlukan publik secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan apa yang ditegaskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal (Budiasih,2014).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang berlatar belakang atau memahami bidang akuntansi dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan, begitu pula sebaliknya, apabila bidang akuntansi diisi oleh SDM yang tidak berkompetensi di bidang akuntansi dapat menjadi pengaruh kurangna pengelolaan keuangan daerah dengan baik dan benar (Janitra,2015). Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatusistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kompetensi merupakan suatu karakteristik seseorang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan (Kayati,2016).

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (outputs) dan hasil-hasil (outcomes). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, yang didukung dengan latar

belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempuyai pengalaman dibidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan sitem akuntansi, sumber daya yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Komalasari, 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Dari hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan Semester I Tahun 2016 pada kabupaten/kota se-Provinsi Lampung menunjukkan adanya 125 kasus kelemahan SPI di pemerintahan yang terdiri atas tiga kelompok temuan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 175 kasus senilai Rp 56,22 milyar (BPK, IHPS, Semester I, 2016).

Adapun penyebab dari permasalahan atas LKPD yangmemperolehopini Tidak Wajar adalahlaporan keuangan tidak menyajikansecara wajar sesuai dengan SAP, di antaranya: akun aset tetap, kas, belanja modal, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang berdampak material terhadap kewajara laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah Prinsip–prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia”. .(BPK, IHPS,Semester I,2016)

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia menarik untuk dikaji karena banyak penyimpangan ditemukan oleh BPK-RI dalam pelaksanaan audit laporan keuangan seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Lampung. Menurut wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri optimistis seluruh pemerintah daerah di Provinsi Lampung dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk laporan keuangan 2017. Berkaca pada kinerja laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Lampung 2016, Pemprov Lampung dan 12 kabupaten/kota meraih opini WTP. Ke-12 kabupaten/kota se-Provinsi itu yakni Bandar Lampung, Metro, Tulangbawang, Pringsewu, Mesuji, Way Kanan, Lampung Selatan, Lampung Utara, Tulangbawang Barat, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesawaran. Atas opini tersebut, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung Alfiker Saringoringo menyerahkan piagam penghargaan. Memperoleh opini WTP artinya melaksanakan tata kelola keuangan sesuai ketentuan. Selanjutnya, yang harus dicapai adalah mempertahankan WTP dengan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan yakni penyediaan infrastruktur, peningkatan kompetensi SDM dan melakukan sinergi yang baik dengan instansi lain seperti BPKP.(http://www.katalampung.com).

Fenomena lainnya diperoleh dari hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian **(WDP).** Kepala Daerah beserta jajarannya, Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Lampung dan tim pemeriksa Berharap opini Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 tersebut dapat ditingkatkan dan lebih baik lagi di Tahun Anggaran 2017. Hal yang lebih penting lagi adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik serta opini yang telah dicapai dapat diwujudnyatakan dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat secara adil dan merata. Selain itu, kepala perwakilan juga mengingatkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota agar segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima (http://www.bandarlampung.bpk.go.id).

Penelitian yang (Hasniati,2016) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak perpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Botituhe (2012) menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (Kayati,2016). Yang berjudul pengaruh faktor keperilakuan Organisasi terhadap kegunaan system Akuntansi keuangan daerah skpd di badan ketahanan pangan provinsi jawa tengah. Hasil penelitian menunjukkan (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan tehadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah, (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan tujuan terhadap kegunaan siste akuntansi keuangan daerah, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan dukungan atasan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terdapat pada ruang lingkup waktu, yang mana penelitian ini terdapat pada provinsi jawa tengah serta penelitian ini terdapat pada periode 2017 dan penambahan variabel independen yaitu sumber daya manusia yang mana sumber daya manusia yang berkualitas akan menghasilkan laporan keuangan yang andal atau dapat dipercaya sehingga nanti nya akan meningkatkan hasil audit BPK RI Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lampung Timur".**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah Pelatihan memiliki pengaruh terhadap Sistem Akutansi Daerah?
2. Apakah Kejelasan Tujuan memiliki pengaruh terhadap Sistem Akutansi Daerah?
3. Apakah Dukungan Atasan memiliki pengaruh terhadap Sistem Akutansi Daerah ?
4. Apakah Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Sistem Akutansi Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara kasus pengaruh Pelatihan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
2. Untuk membuktikan secara kasus pengaruh Kejelasan Tujuan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Untuk membuktikan secara kasus pengaruh Dukungan Atasan terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
4. Untuk membuktikan secara kasus pengaruh Sumber Daya Manusia terhadap Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Timur.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti mengenai Keuangan Daerah.

3. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat menarik investor dalam menanamkan modal nya pada daerah guna mempercepat pembagunan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitian ini maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi mengenai informasi materi serta hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun sistematika penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menggunanka latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tujuan umum mengenai variable dalam penelitian, pengembangan kerangka pemikiran teoritis, seta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga berisi penjelasan mengenai apa saja variable yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, mengenai apa saja populasi dan sampel yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab Keempat berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interprestasi hasil.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah di lakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN